

## IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Selvi Nurdiana

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Untan  
Email: Phe\_kirei@ymail.com.

**Abstrak :** Judul penelitian ini adalah “implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum di kecamatan nanga pinoh kabupaten melawi”. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang masih belum 100 % dapat mencapai target retribusi yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementator tidak mengetahui besar tarif parkir yang tertera di dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum, masih kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki dari segi kuantitasnya yaitu petugas dilapangan (juru parkir), masih kurangnya sumberdaya peralatan sebagai penunjang yaitu lahan parkir yang sempit, disposisi / sikap juru parkir yang tidak menggunakan kelengkapan selama perparkiran dilaksanakan. Untuk rekomendasi pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi Peraturan Daerah mengenai tarif dasar perparkiran melalui sosialisasi dapat pula dengan menambahkan plang dilokasi tertentu mengenai tarif parkir, untuk sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan penambahan petugas parkir dilapangan, sumberdaya keuangan dengan melakukan penganggaran untuk kelengkapan petugas di lapangan dan menetapkan target retribusi disesuaikan dengan kondisi dilapangan, disposisi pelaksana dilapangan dapat ditingkatkan dengan memberikan *reward*, dan melakukan peningkatan koordinasi antar implementator kebijakan.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Retribusi Parkir dan Kontribusi PAD.

**Abstract :** The title of this research is “retribution implementation park by the side of public road in Nanga Pinoh District Office in Melawi Regency”. The title of this research concern was retribution implementation park by the side of public road which still not yet 100% can reach the retribution goals which have been specified. This research is qualitative research. Conclusion in this research is implementators do not know big of tariff park which as describe in by law of concerning retribution park by the side of public road, still the lack of resources of human being owned from its amount facet that is field worker, still the lack of resources equipments as supported that is farm park narrow, disposition / expert attitude park which do not use the equipment of during parking implementation. For the recommendation of retribution implementation. For the recommendation of retribution implementation park by the side of public road give the congeniality and understanding to society of concerning content of by law of concerning elementary tariff of parking of through socialization earn also by enhancing certain location nameboard hit the tariff park, for the resources of human being can be condused with the worker addition park the field, resources finance by conducting budgeting for the equipment of worker in field and specify the retribution goals adapted for by a field condition, disposition of field executor can be improved by giving reward, and conduct the improvement of coordination usher the implementator policy.

**Keyword :** Policy, Retribution Park and Contribution PAD.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan program yang menjadi urusan rumah tangga daerah, diperlukan adanya pembiayaan guna pelaksanaan aktivitas – aktivitas daerah tersebut. Sumber pemenuhan pembiayaan aktivitas – aktivitas daerah tersebut yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD salah satunya dari sektor retribusi daerah. Melihat kondisi minimnya PAD di Kabupaten Melawi, maka untuk itu pemerintah Kabupaten Melawi lebih kreatif untuk mengoptimalkan potensi yang ada guna pemenuhan kebutuhannya. Target PAD Melawi tahun 2011 adalah sebesar Rp. 17, 5 miliar. Namun hingga pada semester pertama tahun 2011, baru terealisasi sebanyak Rp. 5 miliar atau 28,10 persen atau belum sampai 50 persen dari target (<http://article.wn.com/view/2011/08/12/PAD>).

Salah satu upaya yang dilakukan badan pemerintah untuk meningkatkan PAD tersebut adalah dengan lebih memanfaatkan potensi daerah yang ada, salah satu potensi tersebut adalah retribusi parkir. Oleh karena itu badan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Tabel 1.1**  
**Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Di**  
**Tepi Jalan Umum**

| N<br>o | Tahun               | Target     | Realisasi  | Persentase |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| 1      | Tahun Anggaran 2008 | 29.700.000 | 13.419.800 | 45,18 %    |
| 2      | Tahun Anggaran 2009 | 63.000.000 | 17.895.000 | 28,40%     |
| 3      | Tahun Anggaran 2010 | 37.800.000 | 20.745.000 | 54,85 %    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi

Berdasarkan tabel diatas bahwa implementasi peraturan daerah ini di lapangan masih menemui berbagai permasalahan yang muncul, dimana realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum masih belum dapat mencapai target sebagaimana yang diharapkan yaitu 100%. Kecamatan Nanga Pinoh mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, seharusnya dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini dibarengi dengan peningkatan retribusi parkir pula. Berikut dapat dilihat pada tabel besarnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Melawi.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten**  
**Melawi Tahun 2008 – 2010**

| N<br>o | Ta<br>hu<br>n | Kend<br>araan<br>Roda<br>Dua | Kend<br>araan<br>Roda<br>Empa<br>t | Kend<br>araan<br>Roda<br>Enam | Ju<br>mla<br>h |
|--------|---------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1      | 20<br>08      | 12.84<br>3                   | 267                                | 188                           | 13.<br>298     |
| 2      | 20<br>09      | 13.68<br>5                   | 335                                | 206                           | 14.<br>226     |
| 3      | 20<br>10      | 15.70<br>6                   | 462                                | 233                           | 16.<br>401     |

*Sumber : Samsat Kabupaten Melawi*

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, untuk perkembangannya pada tahun 2008 ke 2009 adalah sebanyak 928 kendaraan bermotor dan perkembangannya pada tahun 2009 ke 2010 adalah sebanyak 2.175 kendaraan bermotor, ini mengalami perkembangan yang cukup tinggi pada tahun 2010. Tetapi peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini tidak dibarengi dengan meningkatnya jumlah pendapatan retribusi parkir yaitu pada tahun 2008 ke 2009 retribusi parkir mengalami peningkatan sebesar Rp.4.475.200,- dan pada tahun 2009 ke 2010 retribusi parkir justru mengalami penurunan yaitu hanya sebesar Rp.2.850.000.

### 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendiskripsikan komunikasi implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
2. Mendiskripsikan sumberdaya implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
3. Mendiskripsikan disposisi implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
4. Mendiskripsikan struktur birokrasi implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana penyaluran komunikasi dalam hal memberikan informasi mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum.
2. Mengetahui bagaimana sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum.
3. Mengetahui bagaimana disposisi/sikap implementator dalam melaksanakan dan

menjalankan retribusi parkir di tepi jalan umum.

4. Mengetahui bagaimana struktur birokrasi antara implementator dalam melaksanakan dan menjalankan retribusi parkir di tepi jalan umum.

## II. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

### 2.1 Kerangka Teori

Anderson (dalam Waluyo, 2007:42) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Islamy (dalam Waluyo 2007:51) bahwa “sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan”. Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart Jr (dalam Agustino 2006:139) mengatakan bahwa:

“Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur / dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai / tidaknya tujuan – tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai / tidaknya tujuan – tujuan yang ingin diraih”.

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh

masyarakat. setelah kebijakan dikeluarkan maka akan diimplementasikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur / dilihat dari proses, itu artinya terdapat proses evaluasi didalamnya dengan melihat apakah pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan apakah tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai / tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dipertegas kembali dengan pernyataan Widodo (2008:112) bahwa “ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan”.

Dalam pendekatan Edward III (dalam Agustino, 2006:149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, Edward (dalam Agustino, 2006:150) yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Sumberdaya, indikatornya terdiri dari Staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Edward III mengemukakan bahwa “faktor

sumberdaya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan”. Sumberdaya yang dimaksud meliputi : sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal – hal penting dalam variabel disposisi, Edward (dalam Agustino, 2006:152) yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.

Struktur Birokrasi, pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dengan koordinasi yang baik maka akan adanya satu kesatuan tujuan antar implementator, dengan kesatuan tujuan ini maka implementasi suatu kebijakan akan lebih terarah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi implementasi kebijakan publik, dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum. Evaluasi kebijakan publik menurut Muhandjir (Widodo, 2008:112) merupakan “suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil

yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.

“Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil atau dampak, akan tetapi dapat pula digunakan untuk melihat proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan” (Widodo, 2008:112). Masih menurut Widodo bahwa evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe, pertama adalah tipe evaluasi hasil dan yang kedua adalah evaluasi proses. Evaluasi proses adalah apakah pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan. “Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines)”.

## 2.2 Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Langkah – langkah penelitian yaitu dengan melakukan penelitian dan penelitian lapangan. Tempat penelitian yaitu berlokasi di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dan waktu penelitian selama berada di lapangan adalah satu bulan. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Staff, Koordinator Titik Parkir, Juru parkir di Kecamatan Nanga Pinoh dan Konsumen / pengguna jasa parkir. Objek penelitian adalah Pelaksanaan Retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Instrumen penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Teknik keabsahan data (uji validitas) menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1. Hasil Wawancara**

Peraturan retribusi parkir di tepi jalan umum telah dikomunikasikan kepada masyarakat dan para petugas di lapangan melalui proses sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan masyarakat dan melalui media massa, kendala – kendala yang dihadapi dimana sebagian masyarakat bertanya dan meminta kejelasan mengenai manfaat dari retribusi ini.

Sumberdaya penunjang pelaksana retribusi parkir sebagian besar sudah menunjang seperti aktor yang terlibat tau apa tugas dan fungsi mereka didalam perparkiran, identitas – identitas pengenalan juru parkir telah diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan tetapi dalam pelaksanaannya banyak petugas parkir yang tidak menggunakan kelengkapan parkir seperti rompi dan karcis parkir. Sumberdaya keuangan yang dimiliki masih minim dimana penganggaran untuk kelengkapan parkir tidak dilakukan setiap tahunnya. Kondisi lahan parkir sebagai sarana pendukung masihlah kurang memadai, lahan yang terlalu sempit dan mendekati badan

jalan karena tata kota yang salah. Pada tahun 2008 ke 2009 terjadi kenaikan target retribusi yang sangat signifikan yaitu dari Rp. 29.700.000,- menjadi Rp. 63.000.000,-, tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan target retribusi kembali yaitu menjadi Rp.37.800.000. itu terjadi karena target retribusi pada tahun 2009 tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan yaitu dengan lahan parkir yang minim. Oleh karena itu pada tahun 2010 mengalami penurunan target retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kenyataannya di lapangan. Dalam pelaksanaan perparkiran ini jumlah personil di lapangan masihlah minim, tidak sesuai dengan luas lahan parkir yang ada. Pengetahuan yang dimiliki oleh pelaksana di lapangan mengenai tarif dasar yang telah ditetapkan di dalam peraturan mengenai retribusi parkir ini sangatlah kurang dimiliki, ini terbukti dari beberapa wawancara kepada nara sumber yang justru menanyakan kembali berapa tarif dasar yang ditetapkan di dalam Peraturan tersebut. Sehingga rata – rata petugas parkir menarik tarif sebesar Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 2.000 untuk kendaraan roda empat.

Disposisi / sikap para implementator dalam melaksanakan tugasnya, terutama untuk para juru parkir sudah dikatakan cukup baik, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya dengan tulus dan tanpa paksaan, karena mereka memang menginginkan sendiri pekerjaan itu, hanya saja ada beberapa juru parkir yang tidak

menggunakan rompi, dan sebagian besar juru parkir tidak menggunakan karcis parkir yang telah disediakan pihak Dinas Perhubungan dan menarik pungutan sebesar Rp. 1.000 untuk kendaraan roda dua. Setiap juru parkir menerima imbalan / insentif dari sisa hasil retribusi parkir yang menjadi setoran wajib mereka ke Dinas. Artinya setiap harinya setiap titik parkir berkewajiban membayar setoran wajib kepada Dinas Perhubungan yang besarnya telah ditetapkan secara musyawarah bersama, selebih dari uang setoran tersebut akan menjadi imbalan / insentif bagi para pelaksana dilapangan tersebut.

Koordinasi diantara pihak Dinas Perhubungan dengan para pelaksana dilapangan dikatakan cukup baik, dimana terdapat hubungan yang baik antara keduanya. Untuk pembagian tugas pada pelaksana di lapangan sudahlah baik, dengan aturan yang jelas bahwa setiap titik parkir memiliki satu orang koordinator titik parkir, nanti koordinator titik parkir ini lah yang bertugas mencari anak buahnya untuk bekerja dilokasi titik parkirnya sesuai dengan kebutuhannya.

### **3.1.2. Hasil Observasi**

Observasi dilakukan di 12 lokasi titik parkir yang tersebar di Kecamatan Nanga Pinoh, yaitu: 1). Mini Market Metro, 2). Mini Market Mitra Indah, 3). Pasar Sayur Jalan Rawat Inap, 4). Pasar Sayur Jalan Markasan, 5). Buana Cafe, 6). Top Market, 7). JL. Cempaka Toko Jasa Pertanian, 8). JL. Cempaka Toko Cempaka Permai, 9). Rumah Makan Talago, 10). Klinik Bhakti Husada

dan 11). Losmen Kasuari + Warkop Sinar Pagi. Hasil observasi menunjukkan bahwa dari 12 titik parkir terdapat dua lokasi yang masih belum memiliki lahan parkir, artinya lahan parkir harus dilakukan di badan jalan yaitu di depan Toko Cempaka Permai dan Toko Jasa Pertanian. Terdapat 7 lokasi parkir yang masih kurang memadai atau terkesan kecil dan sempit yaitu di Pasar Sayur Jalan Rawat Inap, Pasar Sayur Jalan Markasan, Buana Cafe, Top Market, Toko Jasa Pertanian, Toko Cempaka Permai dan Rumah Makan Talago. Dari sisi keamanan ada 2 titik parkir dirasa kurang aman karena lokasi parkir telah berada pada badan jalan yaitu di depan Toko Jasa Pertanian dan Toko Cempaka Permai. Juru parkir pada 12 titik parkir menjalankan tugas dengan baik dimana kendaraan rata – rata tertata dengan baik sehingga terlihat lebih rapi. Bila melihat pada sikap pelaksana dilapangan / juru parkir, bisa dikatakan cukup baik seperti memberikan pelayanan, ramah, cepat dan tanggap, tulus melayani, serta perlakuan yang adil dan sama. Terdapat 7 titik parkir yang bertugas parkirnya tidak menggunakan seragam parkir, yaitu : Mini Market Metro, Mini Market Mitra Indah, Top Market, Toko Jasa Pertanian, Toko Cempaka Permai, Rumah Makan Talago dan Klinik Bhakti Husada. Sedangkan untuk karcis parkir, secara keseluruhan 12 titik parkir tersebut tidak ada yang menggunakan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran. Dari 12 titik parkir, tidak ada juru parkir yang menarik pungutan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku Rp. 500 untuk

kendaraan roda dua dan Rp. 1.000 untuk kendaraan roda empat, rata – rata juru parkir menarik pungutan sebesar Rp.1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp. 2.000 untuk kendaraan roda empat. Respon konsumen setelah menerima pelayanan yang diberikan oleh para petugas di lapangan / juru parkir, secara keseluruhan 12 titik parkir menunjukkan bahwa konsumen memberikan respon yang baik kepada juru parkir setelah menerima pelayanan.

Hasil observasi kepada pihak Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugas dengan baik, dilihat dari memberikan pembinaan kepada juru parkir, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaksana di lapangan, melakukan control, tanggap dan sigap apabila menerima laporan mengenai permasalahan di lapangan dan melakukan koordinasi kepada pelaksana di lapangan agar pelaksanaan perparkiran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3.1.3. Hasil Dokumentasi**

Hasil dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berupa Peraturan – peraturan / perundang – undangan yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, seperti : Peraturan Bupati Melawi Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Melawi; dan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2007 Tentang

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Selain itu dokumentasi juga berupa arsip – arsip / berkas –berkas yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, seperti : Data – data lokasi titik parkir tahun 2012; Peta titik parkir tahun 2012; Surat Tugas Nomor 800/62/DISHUBKOMINFO – A/ 2012.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1. Komunikasi**

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dilakukan dengan pendekatan masyarakat atau terjun langsung ke lapangan, kendala – kendala yang muncul pada proses sosialisasi yaitu sebagian masyarakat bertanya – tanya apa manfaat dari diberlakukannya kebijakan ini. Di lapangan penarikan tarif retribusi adalah sebesar Rp. 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 2.000 untuk kendaraan roda empat, ini tidak sesuai dengan yang tertera pada peraturan mengenai retribusi parkir ini. Informasi mengenai kebijakan retribusi parkir ini di lapangan masihlah belum maksimal, inilah salah satu penyebab mengapa rata – rata juru parkir menarik setoran dua kali lipat karena minimnya pengetahuan mereka tentang besaran tarif resmi di dalam Peraturan Daerah tersebut. Tetapi ada juga sebagian dari mereka yang mengetahui besaran tarif resmi perparkiran yang tercantum di dalam Peraturan Daerah, hanya saja ada dari mereka sendiri yang mengatakan dan berdalih bahwa mencari kembalian atau uang Rp. 500 untuk pada saat ini adalah sulit, sehingga menarik Rp. 1.000 untuk kendaraan roda duanya, dan

masyarakat pun tidak merasa keberatan bila harus membayar Rp. 1.000 karena sulitnya mencari uang Rp. 500 tersebut. Pembinaan khusus untuk para pelaksana di lapangan telah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dan secara rutin ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan menarik setoran wajib.

### 3.2.2. Sumberdaya

Dari hasil wawancara kepada beberapa nara sumber penulis menemukan bahwa yang mempunyai tanggung jawab terhadap perparkiran ini memiliki sumberdaya yang menunjang. Mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan sesuai dengan bidangnya masing – masing. Apabila terdapat permasalahan didalam pelaksanaan perparkiran ini, maka akan dilakukan terlebih dahulu azas musyawarah antara juru parkir dan pemilik lahan, apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan azas musyawarah maka koordinator perparkiran akan turun langsung ke lapangan, dan apabila masih belum juga menemukan titik temunya maka akan diselesaikan dengan melakukan rapat terlebih dahulu di Dinas Perhubungan. Sumber dana untuk membiayai operasional pelaksanaan retribusi parkir tidak dilakukan setiap tahunnya hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja. Pemberian *incentive* kepada pelaksana di lapangan / juru parkir tidak di berikan dengan melalui pembayaran resmi dari Pemerintah Kabupaten Melawi. Fasilitas fisik seperti lahan parkir dirasakan masih sangat kurang, dimana luasnya lahan

parkir tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dari 12 titik parkir yang tersebar di Kecamatan Nanga Pinoh, hanya 5 titik parkir yang memiliki lahan parkir yang ideal. Bahkan ada dua titik parkir yang tidak memiliki lahan sehingga harus memarkirkan kendaraan nya pada sisi badan jalan. Selain keberadaan lahan parkir, pihak Dinas Perhubungan juga telah membagikan sarana pendukung lainnya untuk menunjang pelaksanaan perparkiran ini di lapangan berupa tanda pengenal, seperti baju rompi juru parkir yang telah dilengkapi dengan lambang Dinas Perhubungan, Logo – logo dan tulisan juru parkir. Selain itu setiap tahunnya Dinas Perhubungan juga melakukan pengadaan rambu – rambu perparkiran.

### 3.2.3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksana di lapangan melaksanakan tugasnya dengan tulus dan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelaksana di lapangan menunjukkan hasil kerja yang baik seperti kendaraan yang tersusun dengan rapi, ini menunjukkan bahwa mereka memang bekerja dan melayani masyarakat. Hanya saja ada beberapa pelaksana di lapangan yang tidak mengindahkan himbauan dari pihak Dinas Perhubungan untuk menggunakan baju rompi yang telah disediakan, selain itu, karcis parkir yang telah dibagikan oleh pihak Dinas Perhubungan kepada masing – masing lokasi parkir, tidak digunakan sebagai mana

mestinya. Dalam sistem perparkiran ini, juru parkir tidak memperoleh gaji resmi dari Pemerintah Kabupaten Melawi tetapi para juru parkir memperoleh imbalan dari hasil kerja kerasnya sendiri yaitu dari sisa setoran wajib mereka kepada pihak Dinas Perhubungan.

#### **3.2.4. Struktur Birokrasi**

Kewenangan pembagian tugas untuk di dalam organisasi telah diatur di dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Melawi, sedangkan untuk Koordinator Perparkiran dan Koordinator Titik Parkir tugas dan tanggung jawabnya diatur Surat Tugas yang telah di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi. terdapat pembagian tugas yang sangat jelas didalam pelaksanaan perparkiran di Kecamatan Nanga Pinoh ini. Koordinasi antara pelaksana lapangan dengan pihak Dinas Perhubungan berupa pembinaan. Koordinasi dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Apabila terdapat permasalahan di lapangan maka juru parkir akan melaporkan kepada koordinator titik parkir di tempat ia bertugas. Koordinator titik parkir inilah yang nantinya akan melaporkan permasalahan tersebut kepada staff Dinas Perhubungan yang bertugas koordinator perparkiran.

## **IV. SIMPULAN DAN KETERBATASAN**

### **4.1 Simpulan**

#### **4.1.1. Komunikasi**

Proses transformasi kebijakan telah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan kepada kelompok sasaran (masyarakat) yaitu sosialisasi dengan terjun langsung kelapangan dan media massa, sosialisasi diberikan kepada pemilik lahan parkir, pelaksana yang bertugas dan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Pembinaan khusus juga telah diberikan kepada pelaksana di lapangan dengan pemberian motivasi dan wawasan.

Pelaksanaannya di lapangan bahwa implementor belum mengetahui berapa tarif dasar perparkiran yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah, bahkan dari mereka menanyakan kembali besaran tarif resmi perparkiran tersebut. Wawasan masyarakat mengenai isi Perda sangatlah penting, agar masyarakat lebih mengerti dan memahami isi Perda, komunikasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara efektif, mengingat untuk tahun depan akan dikeluarkan revisi Peraturan Daerah untuk retribusi parkir di tepi jalan umum ini. Sosialisasi ini dapat berupa meminta karcis pada saat setiap kali parkir dan mengenai tarif resmi yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah. Sosialisasi ini juga dapat dilakukan dengan memberikan penambahan plang tarif parkir di kawasan yang strategis.

#### **4.1.2. Sumberdaya**

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini maka diperlukan sumber daya manusia. Bila dari segi kualitas, para

implementator telah mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan kewajibannya didalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dan mereka juga mengetahui apa yang harus dikerjakannya dan memiliki strategi – strategi khusus untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan. Sedangkan dari segi kuantitasnya dirasakan masih sangatlah kurang, dimana dalam pelaksanaannya di lapangan jumlah juru parkir yang ada belum sesuai dengan lahan yang tersedia. Sumber daya keuangan dalam hal ini adalah anggaran untuk pengadaan atribut petugas di lapangan dan *insentive* petugas di lapangan. Anggaran di lakukan setiap tahunnya, hanya saja untuk beberapa tahun anggaran tidak ada dan baru pada tahun 2011 anggaran tersebut ada dan pengadaan atribut di lapangan dapat dilakukan. pemberian *incentive* kepada petugas di lapangan tidak menggunakan pembayaran resmi dari Pemerintah Kabupaten Melawi, *incentive* diterima dari sisa hasil pendapatan perparkiran dari setoran wajib tiap lokasi kepada Dinas Perhubungan. Sumberdaya lainnya yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini adalah sarana dan prasana pendukung, seperti lahan parkir dan kelengkapan atribut juru parkir. Lahan untuk parkir di Kecamatan Nanga Pinoh banyak terdapat permasalahannya, seperti di kawasan pasar dan disekitar pinggir – pinggir jalan, dimana lahan – lahan parkir yang berada di pinggir jalan sangatlah sempit akibat tata ruang kota yang dibuat mendekati jalan besar. Pihak Dinas perhubungan telah membagikan atribut parkir kepada petugas juru parkir di lapangan, seperti rompi parkir yang dilengkapi dengan lambang Dinas Perhubungan beserta logo – logo dan tulisan juru parkir, tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak juru parkir yang tidak mengindahkan himbauan dari pihak Dinas Perhubungan tersebut.

Peningkatan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan kuantitas

pelaksana dilapangan guna menyeimbangi dengan kondisi perparkiran yang ada, mengingat jumlah titik parkir yang semakin meningkat untuk setiap tahunnya. Untuk sumberdaya keuangan, dapat dilakukan dengan penganggaran uang untuk kelengkapan – kelengkapan di lapangan sebagai sarana pendukung bagi kelancaran saat melaksanakan tugas. Dan menetapkan target retribusi sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Untuk sumberdaya peralatan dapat dilakukan dengan penataan, penempatan dan penambahan lokasi parkir yang tepat, untuk lahan parkir yang berada di pinggir jalan memang sulit untuk ditata kembali karena memang tata kota yang dibuat sudah mendekati jalan raya. Untuk beberapa lokasi yang masih memiliki lahan yang cukup untuk pengelolaan perparkiran yang masih belum dikelola perparkirannya, ada baiknya bila dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Seperti contoh yaitu di depan Bank BRI, Bank Kalbar dan Rumah Sakit Umum Melawi. Dengan pengelolaan lokasi tersebut akan menambah pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum.

#### **4.1.3. Disposisi**

Petugas pelaksana di lapangan melakukan pekerjaannya secara tulus tanpa ada unsur paksaan, karena mereka sendiri yang menghendaki lokasi parkir yang diinginkannya. Ketulusan ini sangat mempengaruhi kinerja mereka di lapangan. Pelaksana di lapangan ini memperoleh imbalan atas pekerjaannya yaitu dari sisa setoran wajib mereka kepada Dinas Perhubungan. Juru parkir di lapangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dilihat dari kerapian kendaraan di lokasi parkirnya dan respon masyarakat setelah melakukan pelayanan di lokasi yang

bersangkutan. hanya saja ada beberapa juru parkir yang tidak menggunakan rompi parkir yang telah dibagikan oleh pihak Dinas Perhubungan, dan juru parkir tidak menggunakan karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Karcis parkir ini tidak digunakan karena penolakan dari masyarakat yang menganggap remeh kegunaan karcis parkir tersebut, selain DPPKAD yang bertugas mengeluarkan karcis parkir sering terlambat dalam mendistribusikan karcis parkir tersebut kepada Dinas Perhubungan sehingga Dinas Perhubungan tidak dapat membagikan karcis parkir kepada koordinator titik parkir yang tersebar di Kecamatan Nanga Pinoh.

Disposisi dapat ditingkatkan dengan memberikan reward kepada juru parkir yang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada, contoh reward tersebut dapat berupa pujian atau tambahan biaya, karena disposisi ini akan muncul apabila tidak hanya menguntungkan bagi organisasinya saja tetapi juga bagi dirinya sendiri.

#### **4.1.4. Struktur Birokrasi**

Didalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum ini, struktur birokrasi yang ada telah berjalan dengan baik dan telah kondusif pada kebijakan yang tersedia. Dimana pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan retribusi parkir ini adalah pada Dinas Perhubungan, ini telah jelas tercantum didalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2007 tersebut. Didalam pelaksanaan retribusi parkir ini, pihak Dinas Perhubungan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, agar tidak terjadi fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah – pecah) maka pihak Dinas Perhubungan melakukan koordinasi kepada pihak swasta dan masyarakat untuk menyatukan tujuan.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, aktor yang terlibat bukan hanya dari pemerintahan saja tetapi juga dari swasta dan

masyarakat, oleh karena itu koordinasi sangatlah diperlukan. Koordinasi dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan rutin ketitik – titik lokasi parkir untuk menanyakan bagaimana kondisi dan situasi pelaksanaan perparkiran pada saat itu, menanyakan permasalahan dan kendala – kendala yang dihadapi pada saat proses perparkiran dengan tujuan untuk *sharing of information*.

#### **4.2 Keterbatasan Studi**

1. Aspek di luar fokus studi seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat memberikan pengaruh kepada hasil yaitu pada fokus pengelolaan atau penataan, bagaimana mengelola dan menata perparkiran baik dari lokasi maupun pelaksana di lapangan.
2. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan yang mungkin dapat memberikan peluang kepada orang lain untuk dapat menyempurnakannya kembali pada penelitian – penelitian berikutnya. Penelitian ini dirasakan masih belum dilakukan secara mendalam karena jumlah waktu penelitian yang diberikan sangat terbatas yaitu hanya 3 minggu. Contoh peluang tersebut seperti pada fokus sumberdaya baik penunjang maupun manusia yaitu bagaimana kondisi lahan untuk perparkiran yang ideal, selain itu bagaimana pula cara pihak yang berwenang mengatasi masalah diparkiran mengenai keberadaan juru parkir yang tidak sah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi yang telah memberikan kemudahan didalam memperoleh data dan informasi.
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## VI. REFERENSI

Agustino, Leo, 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Sumedang : CV Mandar Maju.

Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Melawi.

Peraturan Daerah Kabupaten melawi Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**  
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email: [jurnalmbis@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmbis@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama lengkap : SELVI NURDIANA

NIM / Periode Lulus : E42008057 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : [Phs\\_kirini@gmail.com](mailto:Phs_kirini@gmail.com) / 085345249024

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ Fulltext

☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya seni ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Mengetujui/Disetujui  
Pengelola Jurnal 10/1/2013  
  
Dra. H. Agus Eko, M.Si  
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 10 Januari 2013

  
(SELVI NURDIANA)